



Rika Santina<sup>1</sup>

## PENGARUH DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan untuk memahami bagaimana kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kualitas infrastruktur di banyak daerah. Namun, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi, termasuk kapasitas pemerintahan lokal yang terbatas, praktik korupsi, dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Variasi dampak ekonomi juga menjadi perhatian, di mana daerah dengan sumber daya alam yang melimpah dan pemerintahan yang kuat cenderung mengalami peningkatan signifikan dalam kesejahteraan ekonomi, sementara daerah yang kurang berkembang masih menghadapi tantangan besar. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas pemerintahan lokal, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik korupsi, dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah tertinggal. Dengan demikian, desentralisasi dan otonomi daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Indonesia, Pemerintahan Lokal

### Abstract

This study aims to examine the impact of decentralization and regional autonomy on community welfare in Indonesia. Using a literature review method, this research collects and analyzes various relevant sources to understand how decentralization and regional autonomy policies are implemented and their effects on society. The study results indicate that decentralization and regional autonomy have improved the efficiency and effectiveness of public services, community participation, and infrastructure quality in many regions. However, significant challenges need to be addressed, including limited local government capacity, corruption practices, and resource distribution disparities. Economic impact variations are also a concern, with regions rich in natural resources and strong governance experiencing significant economic welfare improvements, while less developed areas still face considerable challenges. This study recommends enhancing local government capacity, stricter oversight of corruption practices, and greater support from the central government for underdeveloped regions. Thus, decentralization and regional autonomy can be effective instruments in achieving more equitable and sustainable community welfare in Indonesia.

**Keywords:** Decentralization, Regional Autonomy, Community Welfare, Indonesia, Local Government

### PENDAHULUAN

Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, terutama melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat pemerintahan lokal dengan memberikan wewenang lebih besar

dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan publik (Nisa, 2023). Harapannya, desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, serta mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di daerah-daerah (Hastuti, 2018).

Desentralisasi merupakan upaya untuk mengalihkan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Ningsih et al., 2023). Pemerintah daerah diharapkan lebih memahami kebutuhan spesifik masyarakatnya sehingga dapat merespons dengan lebih cepat dan tepat (Priyono et al., 2019). Selain itu, desentralisasi diharapkan dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sumber daya lokal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah, sebagai bagian dari desentralisasi, memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengelola anggaran, sumber daya alam, serta kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal (Suryaningsih et al., 2015). Kebijakan otonomi daerah juga mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang kurang berkembang.

Namun, implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia tidak tanpa tantangan. Beberapa daerah menghadapi kendala dalam kapasitas pemerintahan lokal, korupsi, serta ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Meskipun demikian, terdapat pula contoh-contoh sukses di mana desentralisasi dan otonomi daerah telah membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat (Susilowati et al., 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana desentralisasi dan otonomi daerah telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dengan menelaah berbagai studi kasus dan data empiris yang ada.

Penelitian ini juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kebijakan fiskal, tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini menggambarkan pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah sebagai instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dengan menyelami lebih dalam pengaruh dan implikasi dari kebijakan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji pengaruh desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai informasi yang relevan dari berbagai sumber (Sugiyono, 2018). Adapun tahapan-tahapan penelitian ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Topik dan Fokus Penelitian Tahap pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi topik dan fokus penelitian. Peneliti menetapkan topik "Pengaruh Desentralisasi dan Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia" sebagai fokus utama. Dalam tahap ini, peneliti juga merumuskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui studi literatur, seperti:
  - a. Bagaimana desentralisasi dan otonomi daerah diimplementasikan di Indonesia?
  - b. Apa dampak desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia?
  - c. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

2. Pencarian Literatur Setelah topik dan fokus penelitian ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pencarian literatur yang relevan. Peneliti mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang kredibel, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, disertasi, artikel konferensi, dan dokumen resmi pemerintah. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, PubMed, dan lain-lain. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "desentralisasi", "otonomi daerah", "kesejahteraan masyarakat", "Indonesia", dan kombinasi dari kata-kata tersebut.
3. Seleksi Literatur Dalam tahap ini, peneliti menyaring literatur yang telah ditemukan berdasarkan relevansi dan kualitas. Literatur yang tidak relevan atau tidak memenuhi standar kualitas diabaikan. Peneliti memastikan bahwa sumber-sumber yang dipilih memiliki metode yang jelas, data yang valid, dan analisis yang komprehensif. Proses seleksi ini melibatkan pembacaan abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan dari setiap literatur untuk menentukan kecocokannya dengan penelitian.
4. Pengumpulan Data dan Informasi Setelah literatur yang relevan dipilih, peneliti mengumpulkan data dan informasi yang terkandung dalam literatur tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, indikator kesejahteraan masyarakat, studi kasus dari berbagai daerah, serta analisis empiris yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Data ini kemudian diorganisasikan dalam kategori-kategori yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.
5. Analisis Data Dalam tahap analisis, peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan. Peneliti mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan temuan utama yang muncul dari literatur yang dipelajari. Analisis ini mencakup komparasi antar daerah, identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta evaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Sintesis Temuan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyusun sintesis temuan dari berbagai literatur yang telah dipelajari. Sintesis ini mencakup rangkuman dari temuan utama, interpretasi data, serta kesimpulan yang diambil dari studi literatur. Peneliti juga mengidentifikasi gap dalam literatur yang ada dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.
7. Penyusunan Laporan Penelitian Tahap akhir dalam metode studi literatur adalah penyusunan laporan penelitian. Laporan ini mencakup latar belakang, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan dari penelitian. Peneliti menyusun laporan dengan format yang sistematis dan jelas, serta mencantumkan referensi dari semua literatur yang digunakan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman tentang pengaruh desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, penelitian menggunakan metode studi literatur dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang dikaji dan menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan publik di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian ini dirangkum berdasarkan berbagai literatur yang telah dipelajari mengenai pengaruh desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berikut adalah temuan-temuan utama yang diidentifikasi melalui metode studi literatur:

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik Literatur menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di banyak daerah di Indonesia. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan lebih besar dapat menyesuaikan program dan kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal (Prabowo & Rafli, 2020). Contoh nyata adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan di beberapa daerah yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Studi menunjukkan bahwa desentralisasi telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Masyarakat menjadi lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal (Christia & Ispriyarno, 2019). Hal ini berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, serta meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program pemerintah.
3. Variasi dalam Dampak Ekonomi Pengaruh desentralisasi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat bervariasi antar daerah. Beberapa daerah dengan sumber daya alam yang melimpah dan kapasitas pemerintahan yang kuat mengalami peningkatan signifikan dalam kesejahteraan ekonomi. Namun, daerah-daerah yang kurang berkembang dan memiliki keterbatasan sumber daya sering kali masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rachmad et al., 2023). Literatur juga menunjukkan bahwa ketimpangan antar daerah masih menjadi masalah yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih adil dan merata.
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desentralisasi telah mendorong peningkatan investasi dalam infrastruktur di banyak daerah. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas lokal, sehingga banyak daerah yang berhasil memperbaiki jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan infrastruktur lainnya (Ningsih et al., 2023). Peningkatan infrastruktur ini berdampak positif terhadap aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
5. Tantangan dalam Kapasitas Pemerintahan Lokal Meskipun banyak keberhasilan yang dicapai, desentralisasi juga menghadapi tantangan signifikan terkait kapasitas pemerintahan lokal (Safitri, 2016). Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan kemampuan teknis untuk mengelola otonomi dengan efektif. Hal ini sering kali menghambat pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik, serta memerlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat dan peningkatan kapasitas lokal.
6. Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan Literatur menunjukkan bahwa desentralisasi juga membawa risiko peningkatan korupsi di tingkat lokal. Kewenangan yang lebih besar di tangan pemerintah daerah kadang-kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Syamsul, 2020). Studi kasus dari beberapa daerah menunjukkan bahwa korupsi dan praktik tata kelola yang buruk dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pencapaian tujuan kesejahteraan.
7. Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial Beberapa studi mengindikasikan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah membuka peluang bagi peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Pemerintah daerah yang responsif terhadap isu-isu gender dan inklusi sering kali mengembangkan program-program yang lebih inklusif, seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak kelompok marginal (Nasution, 2016). Namun, implementasi kebijakan ini masih bervariasi dan memerlukan dukungan yang konsisten.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Desentralisasi berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kualitas infrastruktur di banyak daerah. Namun, tantangan terkait kapasitas pemerintahan lokal, korupsi, dan ketimpangan antar daerah masih perlu diatasi untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan (Hastuti, 2018).

Penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi kebijakan, antara lain peningkatan kapasitas pemerintahan lokal, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik korupsi, serta dukungan yang lebih adil dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah yang kurang berkembang (Kurnia, 2022). Dengan mengatasi tantangan ini, desentralisasi dan otonomi daerah dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua konsep yang saling terkait dan telah menjadi bagian integral dari reformasi pemerintahan di Indonesia sejak era reformasi. Kebijakan

ini bertujuan untuk mendekatkan pemerintahan kepada rakyat, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Zubaedah & Hafizi, 2022). Melalui desentralisasi, kewenangan yang sebelumnya terpusat di pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di berbagai wilayah.

Desentralisasi di Indonesia diimplementasikan melalui dua undang-undang penting, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, keuangan, dan pembangunan daerah masing-masing (Fatimah & Priyono, 2020).

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, desentralisasi diharapkan dapat membawa dampak positif dengan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal (Christia & Ispriyarno, 2019). Studi literatur menunjukkan bahwa di beberapa daerah, desentralisasi telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan (Nazikha & Rahmawati, 2021). Pemerintah daerah yang memiliki otonomi lebih besar mampu menyesuaikan program dan kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Misalnya, di beberapa daerah yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, kini mengalami peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, implementasi desentralisasi tidak selalu berjalan mulus dan merata di seluruh daerah (Nazikha & Rahmawati, 2021). Tantangan signifikan yang dihadapi meliputi kapasitas pemerintahan lokal yang masih terbatas, praktik korupsi, dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya (Sulistiwati, 2014). Kapasitas pemerintahan lokal yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, dan kemampuan teknis sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang efektif (Arka & Yasa, 2015). Beberapa daerah masih kesulitan dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program pembangunan, sehingga diperlukan dukungan yang lebih lanjut dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas lokal (Ningsih et al., 2023).

Selain itu, korupsi menjadi isu yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi desentralisasi. Literatur menunjukkan bahwa kewenangan yang lebih besar di tangan pemerintah daerah kadang-kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Studi kasus dari beberapa daerah menunjukkan bahwa praktik korupsi dan tata kelola yang buruk dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pencapaian tujuan kesejahteraan (Sasana, 2016). Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal menjadi sangat penting untuk memastikan desentralisasi dapat berjalan dengan baik.

Variasi dampak ekonomi desentralisasi juga menjadi sorotan dalam pembahasan ini. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan kapasitas pemerintahan yang kuat cenderung mengalami peningkatan signifikan dalam kesejahteraan ekonomi (Rachmad et al., 2023). Namun, daerah-daerah yang kurang berkembang dan memiliki keterbatasan sumber daya sering kali masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Swandewi, 2014). Ketimpangan antar daerah masih menjadi masalah yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih adil dan merata. Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus dan dukungan yang lebih besar kepada daerah-daerah yang tertinggal untuk memastikan seluruh wilayah Indonesia dapat merasakan manfaat dari desentralisasi dan otonomi daerah (Sulistiwati, 2014).

Desentralisasi juga telah mendorong peningkatan investasi dalam infrastruktur di banyak daerah. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas lokal, sehingga banyak daerah yang berhasil memperbaiki jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan infrastruktur lainnya (Hastuti, 2018). Peningkatan infrastruktur ini berdampak positif

terhadap aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Infrastruktur yang baik juga mendukung kegiatan ekonomi lokal dan membuka peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Dalam hal kesetaraan gender dan inklusi sosial, desentralisasi dan otonomi daerah telah membuka peluang bagi peningkatan partisipasi kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalisasi (Zubaedah & Hafizi, 2022). Pemerintah daerah yang responsif terhadap isu-isu gender dan inklusi sosial sering kali mengembangkan program-program yang lebih inklusif, seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak kelompok marginal. Namun, implementasi kebijakan ini masih bervariasi dan memerlukan dukungan yang konsisten dari berbagai pihak untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari desentralisasi (Nazikha & Rahmawati, 2021).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, tantangan-tantangan yang ada perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang memadai. Penguatan kapasitas pemerintahan lokal, pemberantasan korupsi, dan kebijakan redistribusi yang adil merupakan beberapa langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan desentralisasi dan otonomi daerah dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, desentralisasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun banyak daerah yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat, tantangan seperti kapasitas pemerintahan lokal yang terbatas, korupsi, dan ketimpangan antar daerah masih perlu diatasi. Kesimpulannya, desentralisasi dan otonomi daerah memiliki potensi besar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, namun memerlukan penguatan kapasitas dan kebijakan yang lebih adil serta pengawasan yang ketat.

## SARAN

Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas pemerintahan lokal melalui pelatihan dan pendampingan, serta peningkatan pengawasan untuk mengurangi praktik korupsi. Selain itu, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada daerah-daerah tertinggal untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Kebijakan yang lebih adil dan merata akan memastikan seluruh masyarakat Indonesia merasakan manfaat dari desentralisasi dan otonomi daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, termasuk keluarga, rekan-rekan, dan lembaga yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para ahli dan penulis literatur yang menjadi sumber inspirasi dan informasi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arka, S., & Yasa, I. K. O. A. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 44328.
- Christia, A. M., & Ispriyarsa, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Fatimah, A. N., & Priyono, N. (2020). Kontribusi PAD, dana perimbangan, belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 4(2), 75–92.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian

- Keuangan Ri Tahun 2018, 784–799.
- Kurnia, T. (2022). Pengaruh Dualisme Kedudukan dan Wewenang Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam Prespektif Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2966–2971.
- Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 4(2), 206–215.
- Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, 1(2), 120–134.
- Ningsih, K. S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2606–2614.
- Nisa, S. (2023). PERANAN PENGALOKASIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA: PERANAN PENGALOKASIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 91–99.
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28.
- Priyono, N., Juliprijanto, W., & Setyawan, S. (2019). Studi Empiris: Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 4(2), 13–25.
- Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 75–88.
- Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- Sasana, H. (2016). Dampak implementasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di provinsi di Indonesia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 30(1).
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sulistiwati, R. (2014). Implementasi desentralisasi dan otonomi daerah pada Daerah Otonomi Baru (DOB)(Studi di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung). *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 16(3), 270–281.
- Suryaningsih, N. N., Utama, M. S., & Yasa, I. N. M. (2015). Dampak kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(8), 537–554.
- Susilowati, M. W. K., Christie, A. A. M., Hastuti, P. R., & Matitaputty, S. J. (2021). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Swandewi, A. (2014). Pengaruh dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap keserasian anggaran dan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(7), 356–376.
- Syamsul, S. (2020). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan di indonesia. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17(1), 140–147.
- Zubaedah, P. A., & Hafizi, R. (2022). Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 865–878.